Kajian Terhadap Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan

(Studi Kasus Pada Kota Palembang)

Rahmad Effendi

rahmad\_e@yahoo.com

***Absract****. Success Stories from Thailand via the OTOP (one tambon one product), which is known as product development program in an area (Tambon) were successful in helping the development of Small and Medium Enterprises (SMEs). There are many approaches to the various regions in developing their full potential and in accordance with the characteristics of the local specialties, including public policy development efforts. The purpose of this paper focuses providing public policy advice to local governments how to develop and empower a superior product. This is necessary because of competition from outside the SMEs will always hold their development, the magnitude and diversity of SMEs in the region are also a challenge, besides the lack of data and information about the presence and profile of SMEs makes it difficult for local governments to determine the high potential of SMEs to grow .*

*The methodology used in this paper refers to the assessment of each alternative products based assessment based on statistical data and conduct Focus Group disscussion (FGD) with all the representatives of stakeholders to define policy alternatives to be taken in the context of the development of superior products that have been identified.*

*Keywords: policy, outstanding product*

1. **Latar Belakang**

Pendekatan produk unggulan merupakan suatu alternatif pendekatan dan sekaligus *platform* dalam membangun agenda bersama multi pihak bagi peningkatan daya saing bisnis, khususnya UMKM, dan daerah. Di lain pihak, perkembangan pengetahuan dan teknologi mewarnai “ekonomi baru” (termasuk perekonomian daerah) dan berimplikasi pada perubahan tantangan yang juga harus dihadapi oleh daerah: aktivitas ekonomi daerah semakin terbuka, setiap daerah perlu berinteraksi, membangun jejaring, dan inovatif. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah pun dipengaruhi dan ditentukan oleh “penyegaran dan pembaharuan” yang dilakukan oleh beragam elemen dalam masyarakat. Karena itu, setiap daerah akan memerlukan upaya mengembangkan “daya tarik” daerahnya bagi investasi dan sumber daya produktif lainnya, mengembangkan beragam jaringan, kolaborasi atau bauran keterkaitan produktif untuk menghadapi tantangan (termasuk isu *brain drain* di daerah) dan mendukung pengembangan dan pemanfaatan potensi terbaik dan karakteristik khusus daerahnya masing-masing.

Daerah perlu berupaya mereformasi wajah baru geografinya untuk semakin menjadi tempat berkualitas dan mengembangkan strategi dan prioritas yang sesuai dengan daerahnya. Di antara pihak yang berkepentingan dengan hal ini adalah lembaga “pembangunan ekonomi daerah” *(regional/local economic development agency)*, antara lain Bappeda, Kadin, Asosiasi, Peneliti, Dinas/instansi, dan Perbankan. Hal ini juga yang mendasari perlunya kebijakan yang akan mendorong lebih berkembangnya produk unggulan daerah tersebut.

Pengembangkan penelitian mengenai produk apa saja yang menjadi unggulan daerah yang telah dilakukan berbagai pihak. Hasil penelitian sendiri menemukan produk unggulan yang berbeda disebabkan penentuan metoda, kriteria, dan variabel yang berbeda. Penelitian-penelitian ini berupaya melihat berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi produk unggulan.

Setiap kabupaten di suatu provinsi diharapkan memiliki produk unggulan dan berbagai sektor ekonomi yang patut dan cocok untuk dikembangkan. Hal ini merupakan imitasi dari kesuksesan negara tetangga Thailand melalui program *One Tambon One Product* (OTOP), yaitu program pengembangan produk unggulan di suatu daerah (tambon) yang sukses dalam membantu pengembangan UMKM. Dengan program yang lebih fokus, Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan produk unggulan tertentu di suatu kabupaten/ kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Terdapat beragam pendekatan, bagi beragam daerah dalam mengembangkan potensi terbaik dan sesuai dengan karakteristik khas setempat. Keragaman industri (aktivitas ekonomi) beserta karakteristik masing-masing misalnya, akan membutuhkan pertimbangan upaya pengembangan yang sesuai. Namun dalam pelaksanaan, ada perbedaan implementasi kebijakan yang umum dilakukan dengan OTOP di Thailand.

 Besarnya jumlah dan ragam UMKM di suatu daerah dan belum adanya data dan informasi tentang keberadaan dan profil UMKM menyulitkan pemerintah dalam menentukan UMKM mana yang layak diberi bentuan teknis dan permodalan. Bantuan dan bimbingan seharusnya diberikan kepada UMKM yang berpotensi tinggi untuk berkembang secara mandiri, dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat pula berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Hal inilah yang mendorong perlunya kebijakan pengembangan produk unggulan daerah yang dalam penentuannya tidak didasarkan pada kajian yang tepat. Tujuan dari tulisan ini sendiri berfokus untuk memberikan rekomendasi kebijakan publik kepada pemerintah daerah bagaimana mengembangkan dan memberdayakan produk unggulan.

1. **Model-model Kebijakan publik**

Beberapa ahli berbeda pandangan mengenai keberhasilan suatu implementasi kebijakan apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan itu adalah ada sebagian ahli berpendapat bahwa implementasi kebijakan itu dapat berhasil jika didukung oleh faktor-faktor yang saling menguatkan seperti keterkaitan dalam sebuah sistem, dan di sisi lain ada yang mengemukakannya dalam variabel. Perbedaan pandangan umum terjadi karena tergantung pada konteks mana para ahli kebijakan itu memandangnya. Dalam mengkaji faktor-faktor dan atau variabel yang mempengaruhi kebijakan akan dipaparkan beberapa model kebijakan sebagai bagian berikut:

1. **Model Edwards III**

Edwards III (1980: 9) berpandangan bahwa dalam mengkaji kebijakan, terlebih dahulu perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: “*What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”* Maksudnya, Apa prasyarat untuk keberhasilan kebijakan? Apa hambatan utama keberhasilan kebijakan? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan menguraikan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah: *communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure* (Edwards III, 1980: 10).

Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Bila ditampilkan dalam bentuk gambar bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor atau variabel-variabel yang saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, maka dapat ditampilkan sebagai berikut:

*Gambar 2.1 : Implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980:148)*

Dari gambar tersebut nampak bahwa faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan struktur birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Disamping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh-mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempe-ngaruhi implementasi kebijakan.

1. **Model Van Meter dan Van Horn**

 Van Meter and Van Horn (1975: 462-474) menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Model yang mereka kembangkan lebih populer disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Model yang ditawarkan meliputi enam variabel yang membentuk kaitan *(linkage)* antara kebijakan dan kinerja *(performance)*. Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut seperti diuraikan oleh Tachjan (2008: 39-40), meliputi: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

 Menentukan indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial yang dihadapi oleh implementor di lapangan. Oleh karena itu Meter dan Horn menyarankan sebelum suatu kebijakan diimplementasikan ditentukan terlebih dahulu standar dan sasaran program secara tertulis, sehingga para implementor melakukan aktivitasnya mengacu pada standar yang ada, dan hasil pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari sasaran.

 Winarno (2007: 159) lebih spesifik memaknai pemikiran Meter dan Horn, khususnya dalam komunikasi organisasi yang perlu dibaharui adalah pada rekruitmen dan seleksi, penugasan dan relokasi, kenaikan pangkat, dan bahkan kalau perlu tindakan pemecatan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi tersebut sifatnya tegas, tetapi tetap menurut koridor atau aturan yang ada dan tidak mengesampingkan suasana komunikasi yang fleksibel, humoris dan suasana senda gurau. Komunikasi organisasi sering terlalu tegang, bahkan terlalu panas antara pejabat dan pelaksana kebijakan disebabkan oleh pemaknaan yang keliru diantara pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya benturan kekurangan dana, diantara pelaksana tidak bekerja sesuai target, dan mungkin tidak sinkronnya antara hasil capaian dengan kondisi di lapangan.

 Implementasi kebijakan juga tidak terlepas dengan karakteristik badan-badan pelaksana yang juga mempengaruhi pencapaian kebijakan. Karakteristik badan-badan ini diidentikkan oleh Meter dan Horn dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi pada umumnya dicirikan oleh adanya kekakuan dalam alur kerja, terlalu ketatnya norma-norma dan pola-pola hubungan yang secara rutinitas berlaku dalam organisasi atau suatu lembaga yang memungkinkan suasana dinamis tidak tercipta. Kecenderungan yang diinginkan adalah suasana tidak formal dan tidak terlalu dibatasi oleh sekat-sekat yang terlalu kaku.

 Berikutnya adalah variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik. Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Dari beberapa uraian mengenai variabel-variabel yang saling mempengaruhi terhadap kinerja implementasi kebijakan, dapat gambarkan sebagai berikut:



*Gambar 2.3 : Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter & Van Horn*

*(Sumber: Winarno: 2007: 157 )*

Beberapa model implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas pada prinsipnya memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan pandangan orang yang melahirkan model tersebut dan kondisi dimana kebijakan itu diterapkan. Tidak ada variabel tunggal yang sangat cocok betul atau sesuai dalam suatu implementasi kebijakan. Suksesnya penerapan kebijakan sangat ditentukan oleh banyak indikator, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan itu sendiri, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

1. **Metode Penelitian.**

Metodologi yang digunakan mengacu kepada penilaian masing-masing produk alternatif diberikan berdasarkan penilaian berdasarkan data statistik serta melakukan Focus Group disscussion (FGD) dengan semua wakil *stake holder* untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus diambil dalam konteks pengembangan produk unggulan yang telah diidentifikasi.

**Ruang lingkup**

1. Produk (Barang dan Jasa) unggulan daerah dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan produk pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikategorikan sebagai unggulan daerah pada Kota Palembang.
2. Produk yang mendukung perekonomian daerah serta mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja berdasarkan kondisi saat ini dan prospeknya serta mempunyai daya saing tinggi.
3. Produk yang dikaji adalah produk pada setiap sektor/subsektor ekonomi, yang meliputi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) , pertambangan dan penggalian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan jasa-jasa sebagaimana kategori 9 sektor ekonomi BPS.

**Jenis dan Sumber Data**

Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari nara sumber (tokoh masyarakat dan pejabat daerah) yang sangat mengetahui kondisi UMKM dan ekonomi daerah.

Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari publikasi, laporan penelitian, dinas/instansi dan sumber data lain.

**Alur Pikir**

**Kota**

Berdasarkan hasil pemilihan PU di Kabupaten/ Kota dengan metode AHP, dilakukan pemilihan PU lintas sektoral dengan cara normalisasi

Hasil :

5 PU lintas sektoral

Hasli :Rekomendasi kebijakan tiap PU yang ada di Kabupaten/kota

Penetapan kebijakan tiap PU unggulan melalui FGD di Kabupaten Kota

Rancangan kebijakan tiap PU unggulan

**Alat Analisis**

**S**etelah penentuan produk unggulan kota, stake holder diminta untuk menentukan kriteria dan menentukan tingkat kepentingan dari tiap kebijakan dengan bantuan AHP *(Analytic Hierarchy Process)*

1. **Rancangan Kebijakan dan Hasil Rekomendasi Kebijakan**

Setelah menentukan lima produk unggulan, selanjutkan dilakukan FGD dengan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi maupun yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Kebijakan diambil berdasarkan produk serta diolah dengan menggunakan AHP. Paserta FGD menentukan kebijakan yang menjadi prioritas utama dengan memberikan score tertinggi dan seterusnya untuk kebijakan berikutnya. Adapun kebijakan yang diusulkan untuk masing-masing produk unggulan adalah sebagai berikut :

1. **Produk Makanan Olahan**

Produk makanan olahan, yang menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan adalah penyediaan informasi pemasaran (0,024), kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan (0,207), pembinaan teknis produksi / pendampingan, standarisasi mutu & kemasan produk (0,124) perbaikan infrastruktur (0,100) fasilitasi kemitraan usaha (0,080), bantuan fasilitas usaha (0.079) penguatan lembaga kelompok usaha (0,061).

Kebijakan prioritas yang dapat dilakukan antara lain :

1. Dengan memberikan informasi pasar melalui asosiasi atau sentra-sentra makanan olahan dengan mengikutsertakan UMKM pameran dagang. Peta peluang pasar yang cepat dan akurat hendaknya dapat disediakan kepada UMKM serta mempertemukan produsen dan konsumen.
2. Adanya kerjasama antara perbankan, pemerintah maupun pihak ketiga lainnya dalam mengalokasikan kredit, baik dalam bentuk subsidi bunga, pemberian bunga wajar maupun pengontrolan penggunaan kredit
3. Pihak Pemda melakukan pendampingan maupun penyuluhan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga independen sampai UMKM mandiri dan dapat melakuakan pengelolaan usaha secara efisien dan efektif.
4. **Produk Lembaga Ketrampilan**

Produk lembaga ketrampilan, yang menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan adalah link & match dengan dunia kerja (0,200), manajemen administrasi usaha (0,153), mendorong enterprenuship lulusan (0,136), kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan (0,124), penguatan lembaga kelompok usaha (0,120), akreditasi lembaga (0.117), penyediaan informasi pasar (0,091), kemudahan perijinan (0,060).

Kebijakan prioritas yang dapat dilakukan antara lain :

1. Pihak Pemda membuat kebijakan dimana lembaga ketrampilan harus memiliki hubungan kerja sama (MoU) dengan dunia kerja sebelum lembaga ketrampilan menerima siswa dan kebijakan ini dijadikan persyaratan.
2. SDM yang mengelola lembaga ketrampilan harus memiliki kompetensi dan profesional atau didampingi konsultan teknis.
3. Pengelola lembaga ketrampilan memasukkan kurikulum yang mengedapankan jiwa enterpreneuship bagi lulusannya serta diberi kesempatan untuk melakukan magang
4. **Produk Pedagang Kecil**

Produk pedagang kecil kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan (0,202), manajemen & administrasi usaha (0,185), bantuan fasilitas usaha (0,165), perbaikan infrastruktur (0,145), fasilitas kemitraan usaha (0.115), penyediaan informasi pemasaran (0,107) dan penguatan lembaga kelompok usaha (0,080).

Kebijakan prioritas yang dapat dilakukan antara lain :

1. Adanya kerjasama antara perbankan, pemerintah maupun pihak ketiga lainnya dalam mengalokasikan kredit, baik dalam bentuk subsidi bunga, bunga wajar maupun pengontrolan penggunaan kredit
2. Secara berkelanjutan pihak Pemda memberikan pelatihan, penyuluhan maupun pendampingan dengan melibatkan perguruan tinggi maupun lembaga independen lainnya dalam memberikan bantuan manajemen dan administrasi dunia usaha.
3. Bantuan fasilitas usaha diberikan yang sifatnya mendidik dan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh UMKM dan harus dikembalikan dalam bentuk penyertaan modal untuk pemerintah dan selanjutnya akan dikembalikan kembali kepada unit usaha lainnya.

 **d. Produk Industri Kerajinan**

Produk industri kerajinan, yang menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan adalah penyediaan informasi (0,173), kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan (0,147), bantuan fasilitas usaha (0,135), perbaikan infrastruktur (0,121), standarisasi mutu (0,101), penyedian bahan baku (0,088), fasilitasi kemitraan usaha (0,069), manajemen & administrasi usaha ( 0,068), bimbingan teknis produksi & pendampingan (0,049) dan penguatan lembaga kelompok usaha (0,049).

Kebijakan prioritas yang dapat dilakukan antara lain :

1. Adanya kerjasama antara perbankan, pemerintah maupun pihak ketiga lainnya dalam mengalokasikan kredit, baik dalam bentuk subsidi bunga, bunga wajar maupun pengontrolan penggunaan kredit.
2. Dengan memberikan informasi pasar melalui asosiasi dagang dengan mengikutsertakan UMKM pameran dagang serta diberi kemudahan untuk mengakses informasi pasar dengan menggunakan teknologi informasi. Peta peluang pasar yang cepat dan akurat hendaknya dapat disediakan kepada UMKM.
3. Bantuan fasilitas usaha diberikan yang sifatnya mendidik dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh UMKM dan harus dikembalikan dalam bentuk penyertaan modal untuk pemerintah dan selanjutnya akan dikembalikan kembali kepada unit usaha lainnya.

 **e. Produk Angkutan Perkotaan**

Produk angkutan perkotaan, yang menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan adalah penataan trayek & manajemen tranportasi (0,242), perbaikan infrastruktur (jalan, dermaga, halte, dll), sosialisasi & penyuluhan tertib berlalu lintas (0,135), penegakan hukum (0,119), sertifikasi & pembinaan pengemudi (0,103), pembatasan jumlah & peremajaan kendaraan (0,068), keamanaan, ketertiban & kenyamanan (0.050), kemudahan pelayanan perijinan (0,050), kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan (0,040) dan penguatan kelembagaan (0,013).

Kebijakan prioritas yang dapat dilakukan antara lain :

1. Kebijakan penataan trayek dengan mengedepankan manajemen tranportasi dan diambil dengan melihat tingkat kebutuhan penumpang serta jumlah angkutan yang melewati trayek tersebut dan pengembangan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
2. Perbaikan infrastruktur dengan memperbaiki jalan, halte, dermaga serta meniadakan halte-halte bayangan.
3. Penyuluhan tertib lalu lintas dengan melibatkan semua komponen baik dari aparat pemerintah dan polisi, pengemudi, pengusaha angkutan serta masyarakat sebagai pengguna angkutan. Kebijakan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya serta dilakukan secara berkesinambungan.

Selanjutnya, persoalan dalam sebuah kebijakan seringkali banyak muncul pada tahapan implementasi, karena pihak-pihak terkait (stakeholder) dengan kebijakan itu sangat heterogen dan kompleks dan berhadapan dengan berbagai karakter masyarakat. Andaikan jumlah penduduk/ukm dalam suatu daerah berjumlah satu juta orang, maka itu artinya ada satu juta karakter masyarakat yang harus diakomodasi dalam implementasi kebijakan yang ada.

**Rekomendasi Umum**

Selain rekomendasi kebijakan spesifik tiap produk, ada rekomendasi kebijakan umum diantaranya:

**a). Aspek Financial**

Kebijakan financial terkait hubungan UMKM dengan Perbankan dan pemda memberi jaminan terhadap kredit yang diberikan kepada UMKM dan kemudahan memperoleh kredit dengan bunga wajar yang menguntungkan kedua belah pihak. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan :

1. Pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan dukungan financial melalui penempatan dana milik pemda di perbankan sebagai jaminan atas pemberian kredit. Penempatan dana tersebut digunakan sebagai *cash colleteral* atas kredit yang diberikan, sehingga kredit yang diberikan oleh bank kepada UMKM risikonya menjadi rendah. Pemilihan debitur UMKM tetap didasarkan oleh analisa kelayakan oleh bank dan rekomendasi dari dinas terkait.
2. Pengembangan UMKM dapat juga dilakukan dengan memberikan subsidi bunga, melalui penempatan dana Pemda di perbankan. Pemberian berapa prosentase subsidi didasarkan oleh kemampuan finansial masing-masing Pemda. Sehingga dengan skim tersebut suku bunga atau cicilan kredit menjadi lebih terjangkau oleh UMKM. Sama seperti di butir 2, kelayakan pemberian kredit didasarkan atas analisa bank dan rekomendasi dari dinas terkait.
3. Pengembangan UMKM juga dapat ditempuh dengan melibatkan pihak yang lebih banyak antara lain, lembaga penjaminan, dimana resiko-resiko kredit dapat ditanggung secara proporsional. Sehingga, pengembangan lembaga penjaminan kredit yang lebih terstruktur juga menjadi agenda prioritas.

**b). Aspek Organisasi**

Kebijakan organisasi dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antara pihak pemda, UMKM dan perbankan maupun pihak yang diberi otorisasi agar dapat memonitor serta mengontrol semua aktivitas terkait dengan pemberian kredit maupun pelaksanaan usaha agar dapat menguntungkan semua pihak. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Dukungan institusi dalam pengembangan UMKM dapat ditempuh dengan menugaskan sumber daya manusia di masing-masing kabupaten yang bertugas mengakomodasi kepentingan debitur UMKM, *feasibility study* termasuk kegiatan monitoring. Penunjukkan sumber daya manusia tersebut didasarkan atas kesepakatan antara Pemda, Bank Indonesia, dan perbankan setempat.
2. Pihak Pemda dapat mengaktifkan KUD maupun kelompok tani atau unit-unit terkecil dari kelompok tani untuk menjadi mitra dalam memonitor semua kegiatan UMKM terkait dengan pemberian bantuan kredit dari perbankan.
3. Pihak perbankan dapat bekerja sama dengan BPR maupun lembaga keuangan formal maupun non formal lainnya untuk menyalurkan kredit serta memonitor penggunaan kredit dan ikut melakukan pendampingan sampai UMKM menjadi mandiri.

**c). Aspek Manajerial**

Kebijakan manajerial dan enterpreneurship dimaksud untuk memberikan kemampuan SDM didalam mengelola UMKM agar dapat bersaing baik secara regional maupun internasional. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan beberapa, yaitu :

1. Pihak Pemda dapat bekerjasama dengan pihak ketiga maupun dengan mengefektifkan lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi memberikan pelatihan dibidang manajerial maupun enterpreneurship.
2. Pihak Pemda dan perbankan dapat bekerja sama dengan perusahaan khususnya UMKM yang berhasil atau UMKM hasil binaan yang telah mandiri untuk dijadikan tempat magang maupun menjalin kerja sama yang menguntungkan kedua pihak.
3. Pihak Pemda juga dapat bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan pelatihan khususnya didalam pengelolaan dana kredit.
4. Menjadikan UMKM mitra unggulan melalui pebinaan dalam pengeloaan modal maupun produksi sampai UMKM mandiri dan dapat beroperasi secara profesional.

**d). Aspek Penetapan Pilot Project**

Kebijakan ini dimaksud untuk mengambil satu produk unggul dan menjadi skala prioritas untuk dijadikan percontohan produk yang berhasil bilamana berhasil akan diterapkan pada produk yang lain.

1. Kebijakan ini diambil dengan mengedapankan beberapa aspek diantaranya aspek pemasaran, promosi, teknis-produksi, teknologi tepat guna, kualitas produk dan manajemen usaha serta aspek-aspek yang langsung terkait dengan pengelolaan UMKM.
2. Penetapan pilot project juga harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya harus mendukung pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan daya saing produk.
3. Pembiayaan bagi produk yang menjadi pilot project juga tetap memperhatikan *fesiability study* dan rekomendasi dinas terkait serta dukungan dari pihak perbankan.

1. **Simpulan**

Rekomendasi kebijakan publik kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memberdayakan produk unggulan di Kota Palembang adalah:

1. **Produk Makanan Olahan**

yang menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan adalah penyediaan informasi pemasaran, kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan, pembinaan teknis produksi/ pendampingan, standarisasi mutu & kemasan produk, perbaikan infrastruktur, fasilitasi kemitraan usaha, bantuan fasilitas usaha, penguatan lembaga kelompok usaha.

1. **Produk Lembaga Ketrampilan**

Produk lembaga ketrampilan, yang menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan adalah link & match dengan dunia kerja, manajemen administrasi usaha, mendorong enterprenuship lulusan, kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan, penguatan lembaga kelompok usaha, akreditasi lembaga, penyediaan informasi pasar, kemudahan perijinan.

1. **Produk Pedagang Kecil**

Produk pedagang kecil kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan, manajemen & administrasi usaha, bantuan fasilitas usaha, perbaikan infrastruktur, fasilitas kemitraan usaha, penyediaan informasi pemasaran, dan penguatan lembaga kelompok usaha.

**4. Produk Industri Kerajinan**

Produk industri kerajinan, yang menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan adalah penyediaan informasi, kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan, bantuan fasilitas usaha, perbaikan infrastruktur, standarisasi mutu, penyedian bahan baku, fasilitasi kemitraan usaha, manajemen & administrasi usaha, bimbingan teknis produksi & pendampingan dan penguatan lembaga kelompok usaha.

**5. Produk Angkutan Perkotaan**

Produk angkutan perkotaan, yang menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan adalah penataan trayek & manajemen tranportasi, perbaikan infrastruktur (jalan, dermaga, halte, dll), sosialisasi & penyuluhan tertib berlalu lintas, penegakan hukum, sertifikasi & pembinaan pengemudi, pembatasan jumlah & peremajaan kendaraan, keamanaan, ketertiban & kenyamanan, kemudahan pelayanan perijinan, kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan dan penguatan kelembagaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.

Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

[http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Klaster+Sentra+UMKM/Perkembangan+Klaster+UMKM/](http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Klaster%2BSentra%2BUMKM/Perkembangan%2BKlaster%2BUMKM/) diakses tanggal 22 Juli 2012